

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PERUBAHAN**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**KABUPATEN BONE
TAHUN 2021-2023**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas ijin dan perkenannya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2018- 2023 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini berisikan rencana program dan Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, kami menyadari masih banyak kekurangan- kekurangan dan kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan- masukan positif dari semua pihak guna kesempurnaan dokumen Renstra 2021- 2023 ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis (Renstra) Periode Tahun 2021 - 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Bone dan Masyarakat Kabupaten Bone pada umumnya.

Watampone, 16 April 2021

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. BONE



Dra. Hj. St. ROSAWATI., M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19641231 198512 2 030

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI.....		ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan hukum	8
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
	1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
	2.1 Tugas, Fungsi Struktur Organisasi DPPPA.....	11
	2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	19 21
	2.3 Kinerja Pelayanan.....	21
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	36
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..	38
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan.....	38
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bone.	39
	3.3 Tujuan dan sasaran.....	41
	3.4 Telaahan Renstra Kementrian PP dan PA dan Renstra Propinsi...	42
	3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS.....	42
	3.6 Penentuan Isu- Isu Strategis.....	46
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	52
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	52
	4.2 Sasaran jangka menengah DPPPA Kabupaten Bone.....	53
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	55
	5.1 Strategi.....	55
	5.2 Arah Kebijakan.....	55
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	60

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	87
BAB VIII	PENUTUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Bersama Pemerintah Kabupaten Bone Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Npmor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis sebagai bagian integral dari proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sesuai Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja

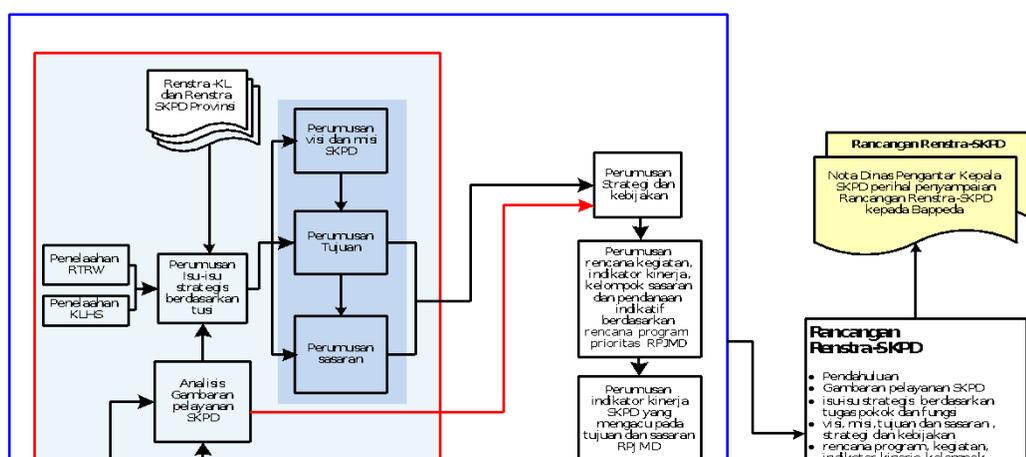
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, RPJMD Kabupaten, dan memperhatikan Renstra Kementerian PP dan PA, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bone.

Proses penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone; (2) Penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone; dan (4) penetapan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi, dan dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone diuraikan sebagai berikut.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone



Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 17. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
 18. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Informasi secara berjenjang dan mandiri Penggolongan/Pengkelompokan Pemberian Kode, dan Daftar Penamaan Menuju Single Codebase untuk digunakan penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Lainnya
21. Peraturan Menteri keuangan Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab/Kota Pasal 109);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;

28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas Di Kabupaten Bone;
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;
30. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023 (lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Bone Nomor 69 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
32. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 60).
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
34. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bone.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran/DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2018 - 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran, Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Bab. V Strategi dan Arah Kebijakan, Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

2.1.1 Struktur Organisasi

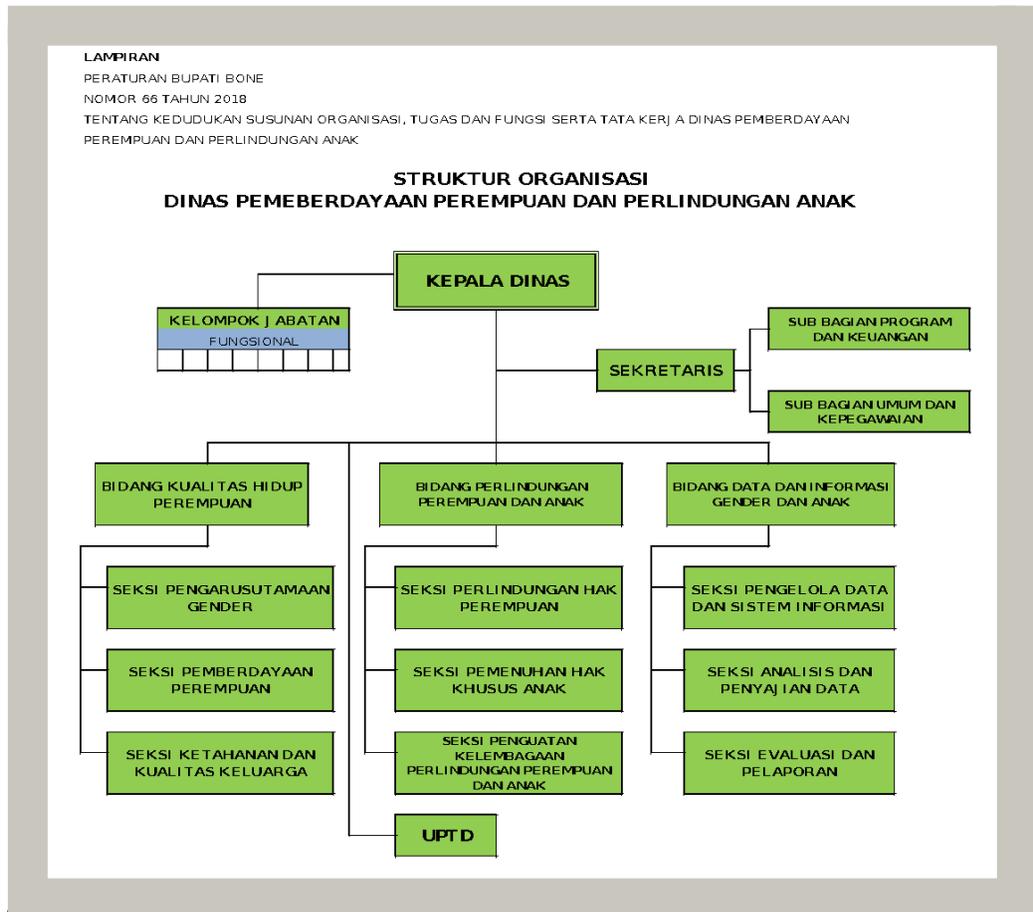
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), dan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
 - Seksi Pengarusutaman Gender
 - Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - Seksi Ketahanan dan Kualitas keluarga
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - Seksi Perlindungan hak Perempuan
 - Seksi Pemenuhan Hak Khusus Anak
 - Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
- e. Bidang Data dan Informasi
 - Seksi Pengelolaan data dan Sistem Informasi
 - Seksi Analisis dan Penyajian Data
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1



2.1.2 Uraian tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 69 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai berikut:

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (1)** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2)** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dinas

- (1)** Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2)** Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas PPPA kabupaten/kota;
 - 2) Penyusunan rencana program dan anggaran;
 - 3) penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi; dan
 - 4) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kepegawaian, dan organisasi serta hubungan masyarakat.

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

3) Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Perogram dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan laporan kinerja, koordinasi, dan penyusunan rencana program dan anggaran, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran, dan pembukuan. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;

2) Penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;

3) Penyiapan pelaporan kinerja;

4) Penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan program dan anggaran;

5) Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;

6) Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi, dan pembukuan keuangan;

7) Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;

8) Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;

9) Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan

10) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha,

kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik daerah. Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan persuratan;
- 2) Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- 3) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan ketertiban kantor;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- 5) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- 6) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- 7) Pengelolaan kehumasan.
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan.

(2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- 3) Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- 4) Pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data anak.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2)** Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan

dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;

- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;
- 3) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender;
- 4) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender; dan
- 5) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

- (1) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.

(2) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

(3) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.

(4) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1) penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

2) pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus dan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

3) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

4) pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan,

- pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 5) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
 - 6) pelaksanaan *monitoring*, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian
 - 7) data perempuan korban kekerasan dan data anak yang memerlukan perlindungan khusus.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone didukung oleh 26 orang pegawai yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 22 orang perempuan baik PNS maupun non PNS dimana PNS berjumlah 19 orang dan Non PNS 8 (delapan) orang. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bone Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Laki- laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	1	5,26	1	5,26	2
3	D3	-	-	-	-	-
4	S1	2	10,52	8	42,10	10
5	S2	3	15,78	4	21,05	7
	Jumlah	6 (31,57)		13 (68,42)		19

Sumber : Bidang data dan Informasi DPPP

Dari jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan pegawai berdasarkan pendidikan yaitu sarjana sebanyak 17 orang dan Strata Satu 10 orang Strata Dua sebanyak 7 orang. Masih sangat membutuhkan pegawai dilihat dari struktur organisasi Dinas PP dan PA khususnya di Bidang Kesekretariatan yakni Kasubag Program dan Keuangan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian masih merangkap dua jenis kegiatan yang berbeda sehingga dalam hal penyelesaian tugas dan fungsinya sangat berat, dengan melihat spesifikasi dan status pendidikan terakhir minimal S-I dan memiliki integritas yang tinggi.

Mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bone Tahun 2021

No	Golongan	Laki- laki		Perempuan		Jumlah
		Jml.	%	Jml.	%	
1	Golongan II	1	26,31	1	26,31	2
2	Golongan III	2	10, 52	10	52,63	12
3	Golongan IV	1	26,31	4	21,05	5
	Jumlah	4	(21 %)	15	(78 %)	19

Dari data pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dapat disimpulkan

bahwa masih adanya kesenjangan yang terjadi berdasarkan golongan, dimana persentase laki- laki 21 % dari jumlah keseluruhan pegawai berdasarkan golongan lebih rendah dibandingkan persentase capaian perempuan 78 % dari Jumlah Keseluruhan Pegawai berdasarkan golongan sehingga masih perlu adanya kebijakan dan intervensi terhadap sumber daya manusia yang ada.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bone Tahun 2018

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1	-	1
2	Mobil	3	-	3
3	Kendaraan roda dua	2	1	3
4	Meja kerja (1/2 Biro)	22	-	22
5	Meja kerja 1 biro	4	-	4
6	Kursi Rapat	31	-	31
7	Kursi kerja	5	-	5
8	Kursi Tamu	2	-	2
9	Kursi pimpinan	1	-	1
10	Televisi	1	-	1
11	AC Ruangan	6	-	6
12	Lemari Arsip 3 pintu	2	-	2
13	Lemari Arsip 4 Pintu	2	-	2
14	Lemari Buku	2	-	2
15	Komputer	4	1	3
16	Printer	9	3	7
17	Filling kabinet	3	1	4
18	Brankas	1	-	1
19	Sound sistem	1	-	1
20	LCD	1	-	1
21	Wireles	1	-	1
22	Laptop	9	-	9
23	Pesawat Telp/ Fax	1	-	1
24	Pemotong kertas	2	-	2

25	Jaringan (Wifi)	1	-	1
----	-----------------	---	---	---

Sumber : Bidang data dan Informasi DPPPA

Dengan melihat data kondisi sarana dan prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone diatas masih sangat terbatas. Kondisi bangunan kantor yang masih berstatus menumpang dan status dipinjam. Demikian halnya dengan peralatan pendukung lainnya masih sangat terbatas sehingga perlu dilengkapi untuk menunjang kinerja pelayanan.

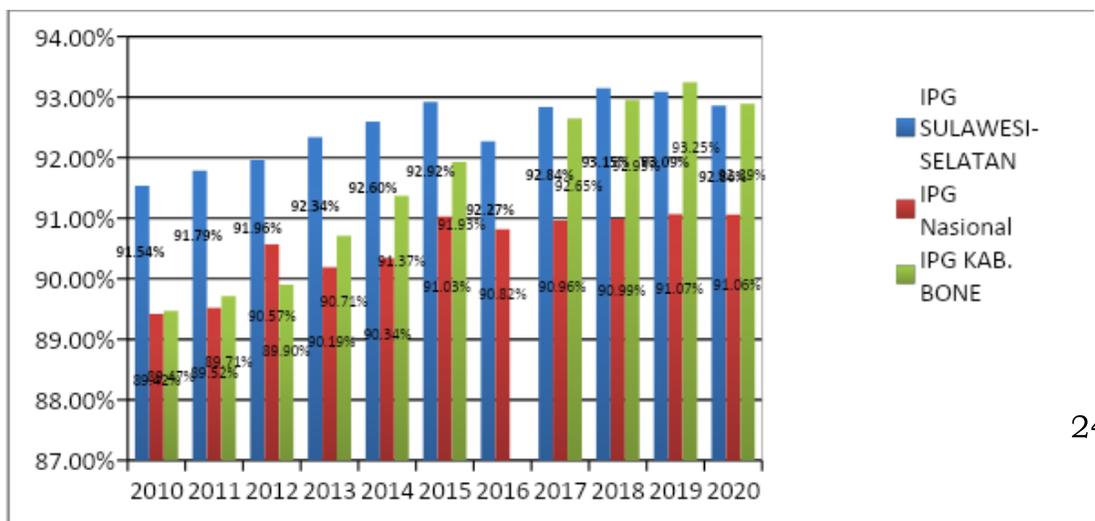
2.2. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Gambaran pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat dilihat dari beberapa indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu :

Gambar 1.

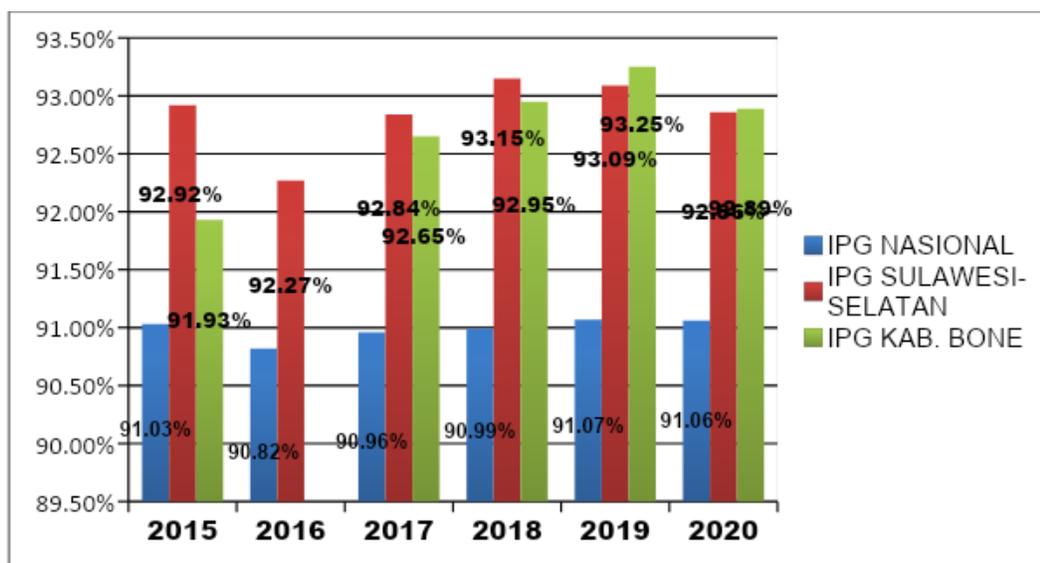
Gambar 1. Grafik Persandingan capaian IPG Provinsi Sulawesi Selatan dengan IPG Nasional



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020.
Data Sensus BPS Statistics Indonesia

Dilihat perkembangan capaian IPG Kabupaten Bone selama kurun waktu lima tahun menunjukkan kenaikan tiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 sebesar 91,93 dan pada tahun 2020 menjadi 92,89 secara rinci pada Gambar berikut.

Gambar 2.
Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Bone dengan IPG Sulawesi Selatan

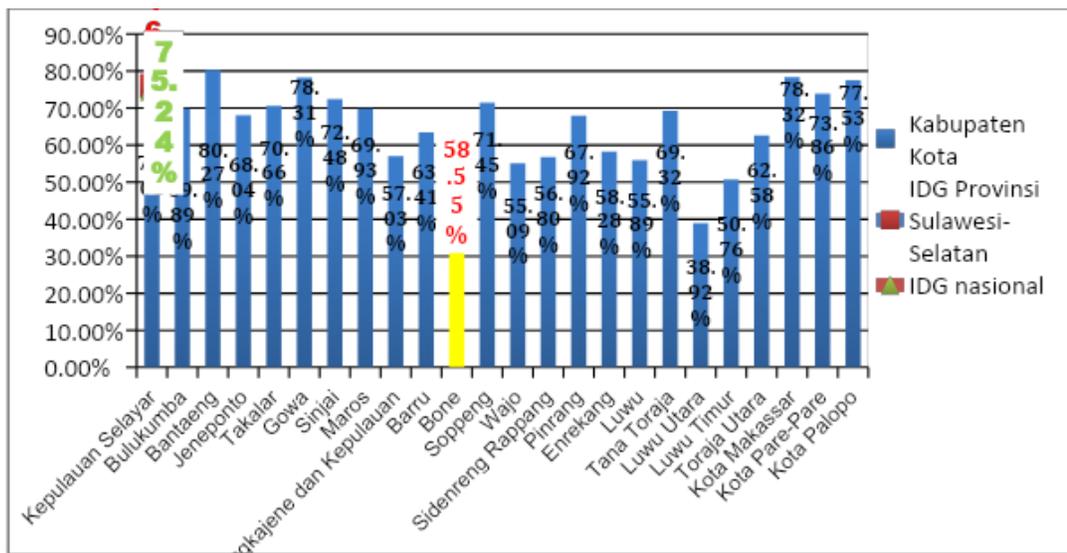


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020.

Melihat capaian IPG Kabupaten Bone selama tahun 2010-2020 terus mengalami peningkatan dan berada diatas IPG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Bila dibandingkan dengan IPG Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, IPG Kabupaten Bone berada pada posisi Sebelas. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Grafik Persandingan Capaian IPG Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan dengan IPG Provinsi dan Nasional

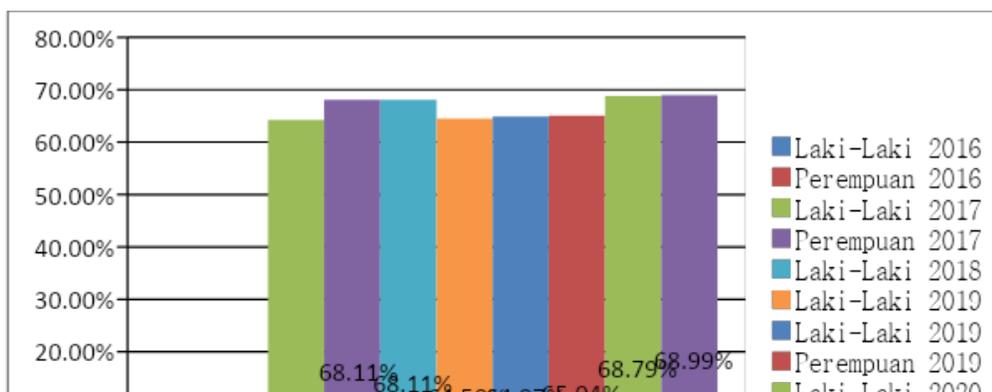
Tahun 2020



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) ditentukan oleh beberapa indikator komposit yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Angka harapan hidup di Kabupaten Bone pada tahun 2018 sebesar 64,5 tahun pada penduduk laki-laki dan 68,4 tahun untuk penduduk perempuan. Untuk angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bone selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut.

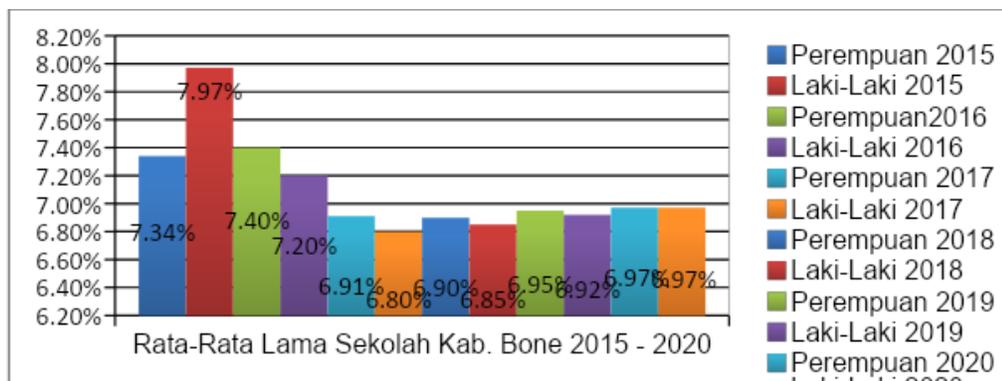
Gambar 2.3
Grafik Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bone pada tahun 2020 sebesar 6,97 tahun pada laki-laki dan 6,97 tahun pada perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa laki-laki memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dari pada perempuan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut

Gambar 2.5
Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

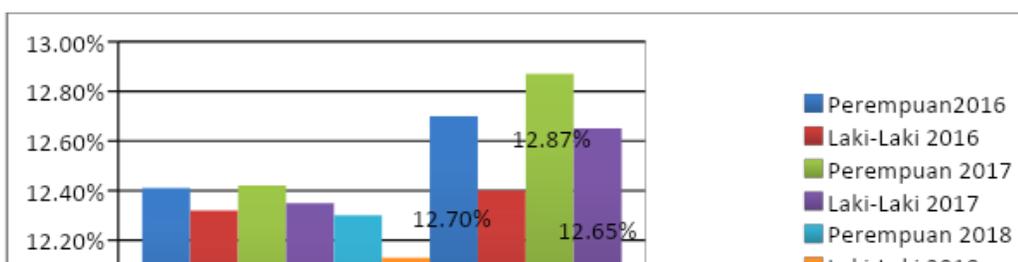


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020

Harapan lama sekolah di Kabupaten Bone pada tahun 2020 sebesar 12,65 tahun pada penduduk laki-laki dan 12,87 tahun pada penduduk perempuan. Dengan demikian tampak bahwa harapan lama sekolah pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut.

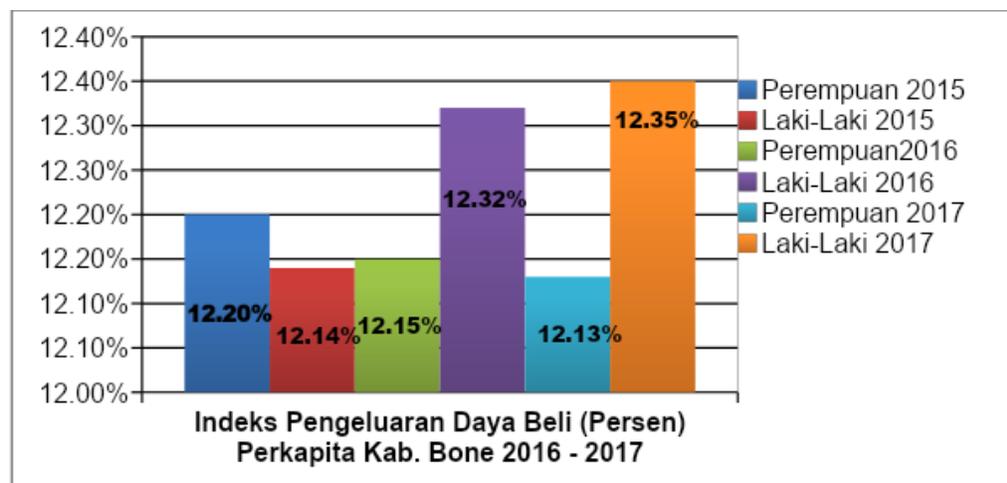
Gambar 2.4
Grafik Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020

Pengeluaran per kapita laki-laki di Kabupaten Bone lebih tinggi jika dibandingkan dengan pengeluaran per kapita perempuan. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan BPS pada tahun 2016-2017 seperti terlihat dalam gambar 2.6 berikut.

Gambar 2.6
Grafik Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2017

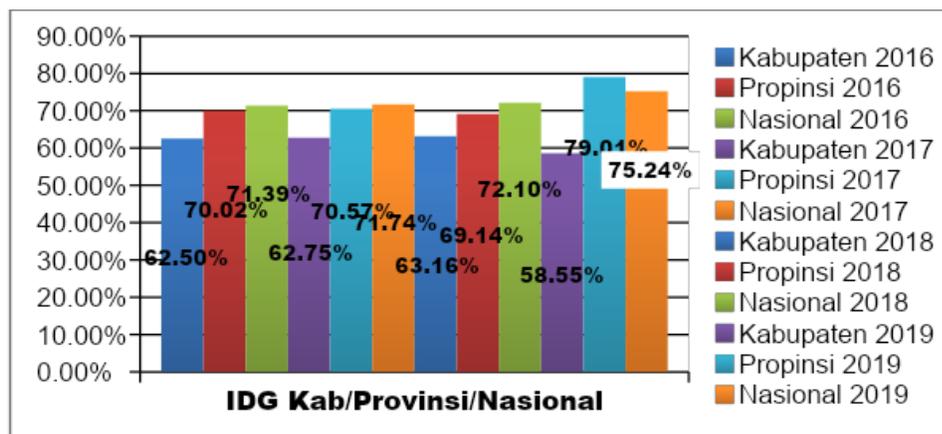


Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender DPP-PA , 2017

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Kabupaten Bone pada tahun 2016 dengan persentase 62,50 % tergolong masih cukup rendah, berada dibawah rata-rata provinsi sulawesi selatan dengan nilai 70.02 % dan nasional 71.39 % dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2018 ke tahun 2019 menjadi turun drastis 58,55 %. Penurunan ini antara lain akibat makin rendahnya jumlah perempuan yang menduduki posisi di legislatif. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

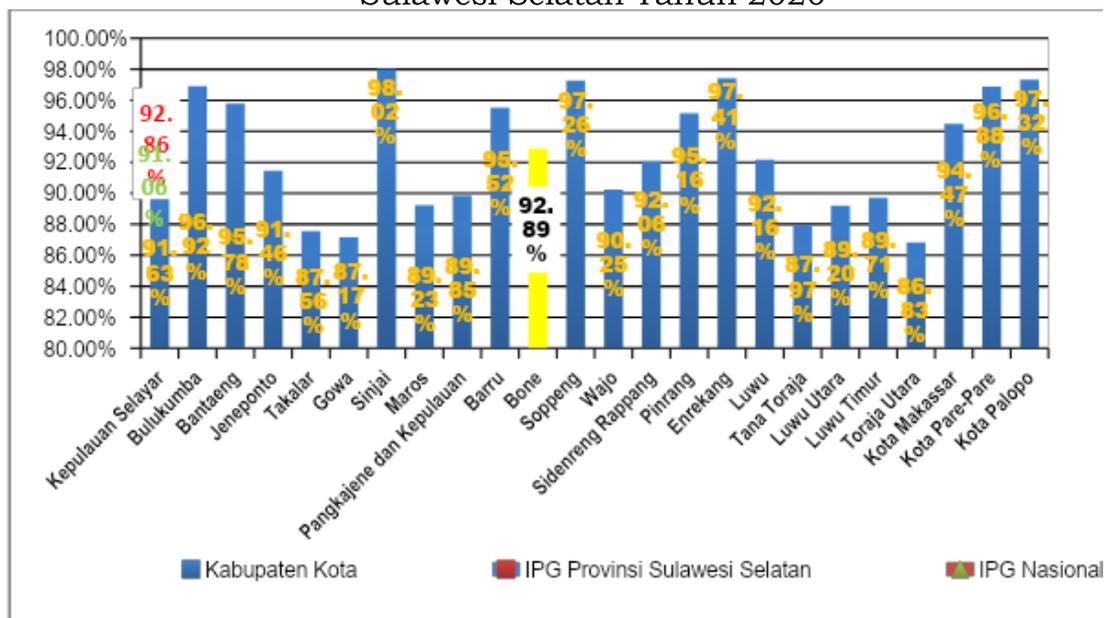
Gambar 2.7
Grafik Perbandingan Capaian IDG Kabupaten Bone dengan IDG Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2019



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2020.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, IDG Kabupaten Bone peringkat 17 (Tujuh Belas) dari 24 Kabupaten/Kota. IDG Kabupaten Bone bahkan menurun dari 62,49 pada tahun 2015 menjadi 58,55 pada tahun 2020 Pada Tahun 2020 diakibatkan oleh dampak Covid 19 yang melanda indonesia dan dunia yang belum memberikan tanda-tanda pemulihan secara penuh dan disebabkan juga anggaran yang direvocusing akibat pandemi ini sehingga menghambat kinerja instansi Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Data capaian IDG Kabupaten Bone selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

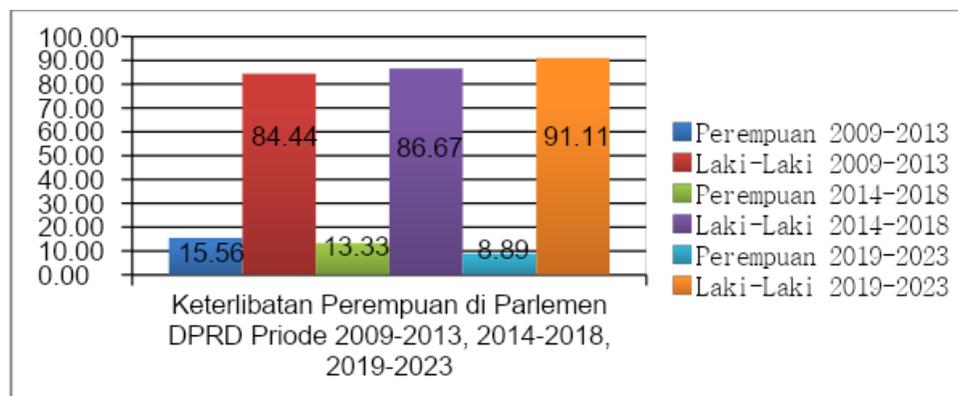
Gambar 2.8
Grafik Persandingan Pencapaian IDG Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020



Sumber Data: Pembangunan Manusia Berbasis Gender DPP-PA 2020

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ditentukan oleh indikator komposit yaitu persentase keterlibatan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi, dan persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Untuk keterlibatan perempuan di parlemen masih sangat rendah dibandingkan target nasional 30% dan cenderung memperlihatkan trend penurunan dari 15,56% pada priode tahun 2009-2013 menjadi 13,33% Priode 2013-2018 terjadi lagi Penurunan pada priode tahun 2019-2023 menjadi 8,89 %, hal ini disebabkan oleh peran serta Perempuan yang ikut dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.9 berikut

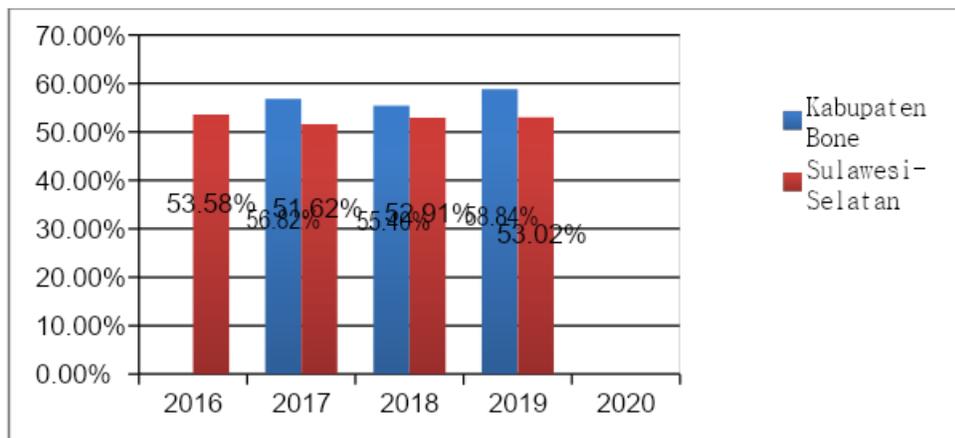
Gambar 2.9
Grafik Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, DPP-PA 2021

Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi di Kabupaten Bone dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Data menunjukkan bahwa persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi di Kabupaten Bone menurun dari 52,87% pada tahun 2014 menjadi 55,74% pada tahun 2015. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.10

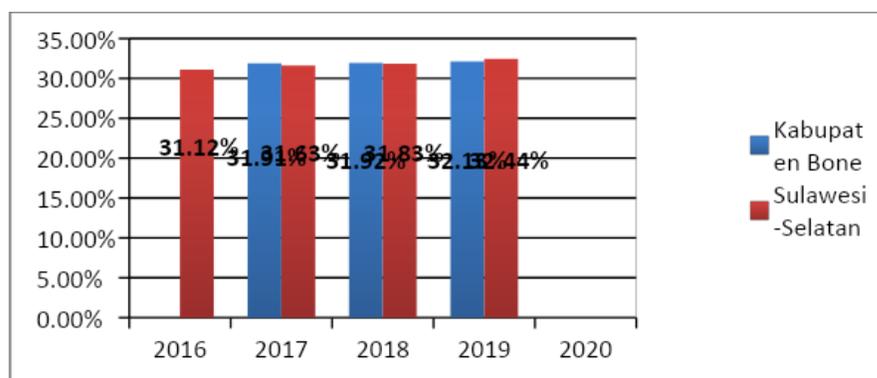
Gambar 2.10
Grafik Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi di Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber Data : Pembangunan Manusia berbasis Gender DPP-PA 2021

Persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja di Kabupaten Bone pada tahun 2015 sebesar 31,12% sedikit meningkat dari tahun 2014 sebesar 30,57%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.11 berikut.

Gambar 2.11
Grafik Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja di Kabupaten Bone Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber Data : Pembangunan Manusia Berbasis Gender DPP-PA 2021

Selanjutnya untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi kenaikan yang signifikan berdasarkan jenis kekerasan yang terjadi dimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.12
Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

No	JENIS KEKERASAN	TAHUN						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	KDRT	41	32	77	25	80	41	38
2	Penganiayaan	16	37	44	22	62	9	4
3	Pemeriksaan	7	6	16	2	9	15	2
4	Pencabulan	17	5	24	11	39	21	4
5	Persinahan	12	9	0	9	4	6	0
6	Membawa lari Anak	0	14	2	2	34	5	0
7	Pencurian (ABH)	0	4	24	10	16	8	0
8	Penemuan Bayi	0	3	0	1	1	1	0
9	Pembunuhan Bayi	0	1	0	1	1	0	0
10	Persetubuhan	0	11	0	3	3	2	10
11	Pengancaman (SIKIS)	0	1	1	2	4	3	0
	Perebutan Hak Asuh Anak	0	0	0	0	0	3	7
13	Penelantaran Anak	0	0	0	0	0	0	4
14	Aborsi	0	1	0	0	1	0	0
15	Menikah Tanpa Izin	0	2	0	4	4	0	0
16	Pemaksaan	0	0	0	0	0	1	1
17	Pemeriksaan dibawa Umur	3	0	8	5	0	0	3
Jumlah total		96	126	198	97	258	115	73

Sumber data : Bidang Data dan Informasi Dinas PP dan PA

Adapun data jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan jenis, juga sifatnya berfluktuasi dilihat dari tahun yang ada , dimana berdasarkan laporan kasus yang masuk pada layanan P2TP2A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.13
Jumlah Kasus KDRT berdasarkan Jenis

No	JENIS KDRT	TAHUN						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Fisik	28	16	55	12	3	11	14
2	Penelantaran	11	11	-	11	5	8	4
3	Psikis	2	3	3	-	6	20	19
4	Seksual	-	1	19	3	4	2	1
Jumlah total		35	43	31	77	26	41	38

Sumber data : Bidang Data dan Informasi Dinas PP dan PA

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone selama 5 tahun terakhir (2013-2018) dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut :

Tabel.2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone
Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	klp/org	24	24	50	50	55	24	24	50	50	55	100	100	100	100	100
2	Peningkatan Peranan Wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS)	klp	17	17	30	35	37	17	17	30	35	37	100	100	100	100	100
3	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	org	390	390	394	394	394	390	390	394	394	394	100	100	100	100	100
4	Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	org	4	5	6	6	7	4	5	6	6	7	100	100	100	100	100
5	Meningkatnya pengetahuan siswa sekolah dasar dan menengah mengenai permasalahan anak dan remaja	org	28	26	10	22	24	28	26	10	22	24	100	100	100	100	100
6	Meningkatnya pemahaman anak sekolah mengenai pencegahan narkoba	org	28	26	10	22	24	28	26	10	22	24	100	100	100	100	100
7	Penyusunan profil statistik dan analisis Gender	pkt	1	1	50	50	50	1	1	50	50	50	100	100	100	100	100
8	Pengembangan Restorative Justice Anak yang berhadapan dengan hukum	org	20	20	15	10	9	20	20	15	10	9	100	100	100	100	100

9	Fasilitasi Pembentukan forum anak	jml	30	30	100	100	50	5	5	5	6	7	100	100	100	100	100
10	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	15,38	15,38	15,70	16,25	17,0	15,28	15,30	15,69	16,20	16,90	100	100	100	100	100
11	Persentase keterlibatan perempuan di DPR	%	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	100	100	100	100	100
12	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	69	70	80	85	90	69	70	80	85	90	100	100	100	100	100
13	Ratio KDRT	%	0,10	0,09	0,03	0,05	0,05	0,10	0,22	0,03	0,05	0,05	100	100	100	100	100
15	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	85	85	90	41	38	85	85	90	41	38	100	100	100	100	100
16	Persentase layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	%	1	1	6	6	6	1	1	6	6	6	100	100	100	100	100
17	Persentase PD yang memiliki data pilah gender dan anak	%	0,30	0,32	0,32	0,33	0,33	0,30	0,32	0,32	0,33	0,33	100	100	100	100	100
18	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Skor	600	700	800	900	900	600	700	800	900	900	100	100	100	100	100
19	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	0,02	0,02	0,02	0,03	0,04	100	100	100	100	100
20	Persentase anak korban kekerasan	%	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	100	100	100	100	100
21	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	105	99	83	80	78	105	99	83	80	78	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 2.14 dapat diketahui Jika dicermati pencapaian sampai saat ini, berdasar kondisi kinerja berdasarkan tugas dan fungsi DP3A kab. Bone saat ini masih terdapat program dan kegiatan yang perlu ditingkatkan dari segala hal pelayanan maupun edukasi pendampingan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka target sasaran tersebut belum semua mampu tercapai secara optimal, karena disebabkan faktor utama karena adanya Global Pandemi Pandemi Corona Disase Covid 19 dan Sars Cov-2 yang melanda dinegara kita dan penyebarannya yang cukup signifikan dan memberikan pengaruh dan dampak bagi masyarakat terutama pada pertumbuhan,ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dengan sangat erat keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone karena keterbatasan gerak dalam hal melakukan pelayanan karena diberlakukannya localarea distascing atau PPKM sehingga adanya keterbatasan ruang dan gerak sehingga realisasi kegiatan mengalami keterlambatan penyerapan realisasi keuangan maupun realisasi kegiatan dan begitu sebaliknya adapun program kegiatan yang telah mencapai target yang telah ditentukan dan secara maksimal pada tahun 2021 pada proses pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2021 tahun berjalan namun masih terdapat permasalahan pelayanan secara umum yang masih dihadapi adalah :

Faktor utama timbulnya kesenjangan dalam pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsih Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

- a. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan ditandai capaian IPG dan IDG yang masih perlu ditingkatkan dilihat dari segi pendidikan yang layak, Partisipasi dan control dan manfaat pembangunan.
- b. Masih tingginya angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja.
- c. Masih kurangnya sosialisai pemahaman masyarakat secara terpadu tentang keberadaan P2TP2A, baik mekanisme pelayanan dan pengaduan.

- d. Masih kurangnya tempat dan penyedia layanan pengaduan masyarakat korban kekerasan dan pengaduan khusus pada tingkat kecamatan dan daerah terpencil sehingga memperlambat proses akses pelayanan terhadap pengaduan masyarakat korban kekerasan Perempuan dan perlindungan anak diakibatkan kondisi jarak, dan sarana dan prasarana terbatas.
- e. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG masih perlu ditingkatkan
- f. Masih kurangnya Advokasi kebijakan pendampingan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan ketingkat bawah.
- g. Masih minimnya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- h. Masih minimnya pelaksanaan, Komunikasi, informasi, Edukasi, KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga
- i. Masih minimnya pendampingan Pemenuhan hak anak kepada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha.

Berdasarkan tabel 2.5 di bawah ini dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja program secara umum

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2016-2020

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Disesuaikan dengan Nomenklatur Baru Permendagri 90 tahun 2019					Disesuaikan dengan Nomenklatur Baru Permendagri 90 tahun 2019					Disesuaikan dengan Nomenklatur Baru Permendagri 90 tahun 2019					
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	456.225.500	684.482.500	463.117.000	526.976.600	156.345.000	456.225.500	448.760.500	463.117.000	526.878.600	156.025.000	100,00	45,62	100,00	99,95	99,89	
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	505.007.000	674.438.000	428.264.000	565.165.000	139.064.800	505.007.000	307.653.000	427.963.800	565.165.000	139.064.800	100,00	21,14	99,93	100,00	100,00	
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	819.311.000	628.400.500	255.538.500	330.000.000	136.665.000	819.311.000		132.837.000	255.538.500	327.882.050	136.665.000	100,00	0,00	100,00	99,19	100,00
5	Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	67.700.500	57.485.000	45.923.000	-145.435.000	156.345.000	67.700.500		45.923.000	100,00	-145.435.000	156.345.000	100,00	45,29	100,00	99,50	99,89
6	Program pelayanan administrasi perkantoran	246.466.000	282.369.000	441.796.100	382.453.800	324.842.200	230.588.000	127.899.000	431.931.689	382.275.900	324.474.900	93,56	80,83	97,77	99,74	99,75	

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	82.200.000	522.825.000	187.744.400	71.140.000	220.400.000 0	37.899.750	422.618.89 0	185.219.89 0	71.056.860	218.459.75 0	46,11	80,83	98,66	99,96	99,49
----------	---	------------	-------------	-------------	------------	------------------	------------	-----------------	-----------------	------------	-----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Berdasarkan perbandingan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2016-2021 dengan pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2016-2021 ada beberapa program dan kegiatan yang telah mencapai target, tujuan, dan sasaran karena atas kerjasama Pemerintah Kabupaten Bone dengan stakeholder terkait dengan dukungan pendanaan yang maksimal sehingga dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Bone dapat menekan laju korban kekerasan dengan meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan yang intens pada tingkat kewenangan Kab/Kota di beberapa wilayah kerja kabupaten Bone sehingga kasus KDRT pada tahun 2019 dengan perolehan persentase 0,10 % dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan penurunan indeks 1,25 % menjadi 0,8 % yang jumlah pelapor tahun 2019 sebanyak 109 orang dan pada tahun 2020 menjadi 99 orang dan persentase korban kekerasan anak pada tahun 2019 dengan nilai 0,07% menurun pada tahun 2020 dengan nilai 0,06 % dengan indeks ratio 1,5 % jumlah Anak Kabupaten/Kota disamping itu peningkatan status Kota Layak Anak Kabupaten Bone (KLA) Pada tahun 2019 mendapat predikat madya dengan nilai skorin ≥ 700 dan pada tahun anggaran berjalan tahun 2021 ≤ 750 dengan predikat Nindya adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan tahun anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah program yang memfasiliasi pengembangan kelembagaan Perlindungan Perempuan dan anak, Advokasi Pendampingan Kasus-Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan pembentukan forum Anak di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, sedangkan segi pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dari lima tahun yang lalu untuk mencapai tujuan dan sasarannya yang belum tercapai maka dibutuhkan penganggaran yang maksimal karena dilihat beberapa program kegiatan yang tidak mencapai target utama dan tidak mengalami peningkatan yang memadai.

2.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.2.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.2.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan Terkait Kesekretariatan:
 - 1) Informasi data untuk penyusunan dokumen perencanaan kurang faktual.
 - 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.
 - 3) Kurangnya jumlah dan pemahaman SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
 - 4) Rendahnya alokasi anggaran APBD dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas PP-PA.
- b. Permasalahan Terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
 - 1) Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG dan IDG;
 - 2) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 3) Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah, perkawinan anak dan penelantaran;
 - 4) Masih tingginya angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja;
 - 5) Keterlibatan perempuan dilembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;
 - 6) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak;
 - 7) Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan pengasuhan yang aman;
 - 8) Belum optimalnya lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga

(PUSPAGA);

- 9) Sangat sulit mendapatkan data terpilah gender dan anak dari OPD dan instansi terkait.

Tabel. 2.16

Permasalahan dan Kondisi kerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2021-2023.

No	Masalah	Masalah Pokok	Alternatif Masalah
1.	<u>Kesekretariatan DP3A</u>		
	1) Informasi data untuk penyusunan dokumen perencanaan kurang factual dan akurat dan sistematis	Kualitas penyusunan perencanaan masih rendah karena dipengaruhi oleh evaluasi dan pelaporan belum berjalan sistematis setiap unit kerja DP3A	Komitmen dan kerjasama harus ditingkatkan serta peran serta fungsi masing-masing ditingkatkan supaya terlaksana dengan baik.
	2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.	Kinerja Aparatur Dinas DP3A mengalami keterlambatan sering terhambat karena karena tidak didukung saran dan prasarana yang belum memadai	Pengadaan sarana dan prasarana peralatan Kantor setiap tahun harus ditingkatkan untuk menunjang kinerja Aparatur
	3) Kurangnya jumlah dan pemahaman SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.	Keterlambatan kinerja Program dan kegiatan sehingga mempengaruhi tingkat realisasi kinerja urusan DP3A	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui Pelatihan, Bimtek, dan pendidikan kejenjang keatas berdasarkan Manajemen ASN sesuai kebutuhan Kantor
	4) Rendahnya alokasi anggaran APBD dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas PP-PA.	Pelayanan dalam bidang urusan DP3A belum maksimal sehingga beberapa program utama, dari segi target kinerja dan output Kegiatan tidak tercapai karena minimnya anggaran.	Anggaran DP3A harus ditingkatkan lagi sehingga dapat menunjang Urusan Program dan Kegiatan sehingga tujuan OPD dapat

			tercapai.
2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	1) Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, ditandai dengan capaian IPG dan IDG;	Kebijakan dan Anggaran responsive pada Peningkatan kestaraan Gender dalam pembangunan harus ditingkatkan	Program dan Kegiatan Urusan Pemerintah Daerah dikembangkan untuk menunjang Peningkatan kualitas kesetaraan Gender
	2) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;	Penyuluhan dan sosialisasi tentang kekerasan Perempuan dan Anak masih minim dan peran serta lembaga perlindungan sehingga masyarakat belum memahami mengenai pentingnya hak-hak perempuan memperoleh perlindungan dan keadilan.	Peran serta lembaga pemerintah harus ditingkatkan dan sosialisasi dan penyuluhan harus ditingkatkan
	3) Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah, perkawinan anak dan penelantaran;	Kurang tempat pelayanan terpadu di beberapa lokasi daerah terpencil dan penyuluhan dan sosialisasi yang belum memadai	Pembentukan dan penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dan peningkatan kapasitas Sumber daya dan tenaga Ahli
	4) Masih tingginya angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja;	Kualitas Sumber Daya Perempuan (SDM) Masih Minim untuk memasuki dunia kerja	Medorong peningkatan pelatihan kerja terhadap perempuan berupa keterampilan dan kreatifitas yang mumpuni
	5) Keterlibatan perempuan	Kurangnya keterwakilan	Pengembangan dan Peningkatan

	dilembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen;	perempuan di parlemen Karena kurang pengetahuan dan kaum gender di masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak Aspiratif kaum perempuan	Sumber Daya Perempuan dan Sosialisasi dan Regulasi yang ada kepentingan emansipasi wanita
	6) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak;	Minimya Kelembagaan pro aktif terhadap pemberdayaan perempuan	Sinergitas kelembagaan harus ditingkatkan dengan dukungan Anggaran yang memadai
	7) Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, dan pengasuhan yang aman;	Pelayanan yang belum optimal karena tidak didukung oleh program dan kegiatan OPD yang terkait dengan urusan kinerja utama	Adanya regulasi yang mendukung Program dan kegiatan yang terkait pelaksanaan kegiatan dan koordinasi antara lembaga ditingkatkan
	8) Belum optimalnya lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);	Adanya keterbasan Penganggaran untuk penyelenggaraan sehingga lembaga pusat Pusat Pembelajaran Keluarga tidak Maksimal	Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus ditingkatkan dengan dukungan penganggaran rensposif
	9) Sangat sulit mendapatkan data terpilah gender dan anak dari OPD dan instansi terkait.	Data Terpilah Gender dan Anak Kurang Akurat	Penyusunan dan dokumen data dengan sistem harus terintegrasi dengan melalui Aflikasi online

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bone

a. Visi

Telaah terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bone terpilih adalah Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai

kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Dengan berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.

2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

b. Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.

4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Mandiri/Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mandiri
5.	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Rumusan tujuan berdasarkan masing-masing misi beserta indikator kinerja dan target kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel Penjabaran Misi Ke Dalam Formulasi Tujuan

No.	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik; 2. Mencegah terjadinya praktek KKN.
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah. 2. Mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan. 2. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan kesehatan. 3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas layanan sosial dasar. 4. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan.
5.	Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan arus investasi. 2. Mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. 2. Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. 3. Mengembangkan seni dan budaya masyarakat

3.4 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PP dan PA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

- b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak. Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak
- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
 - 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
 - 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.
- c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kementerian PP dan PA tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bone
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PP dan PA	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan ditandai capaian IPG dan IDG yang masih rendah. • Masih tingginya angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja • Keterlibatan perempuan dilembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Kurang optimalnya penganggaran dan program dan Kegiatan PUG pada urusan pada instansi yang terkait padapemerintahan Kabupaten Bone 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan perempuan dilembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan dan anak; 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Kurangnya Sosialisasi Terhadap Aturan dan Undang-Undang Perlindungan Perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya upaya Peningkatan peran serta P2TP2A dalam Memberikan penyuluhan dan bimbingan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah, perkawinan anak dan penelantaran; • Belum optimalnya lembaga Pusat 		

3	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); <ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	Terhadap Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Penyediaan Sarana dan Prasarana atau Akses untuk mendapatkan Pelayanan hak-hak dasar Terhadap Pemberdayaan Perempuan dan hak-hak perlindungan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangk an Kota Layak Anak • Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Untuk Pemberdayaa n dan Perlindungan Anak
	b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Kurangnya akses untuk mendapatkan data terpilih Gender dan Anak dari OPD instansi pemerintah yang terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan sasaran meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
2. Meningkatkan perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dengan sasaran meningkatnya layanan dan perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang;
3. Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga menuju KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA), dengan sasaran meningkatnya ketercapaian ketahanan dan kualitas keluarga;
4. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak.
 - b. Meningkatnya lembaga yang menyediakan layanan bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)
5. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yg komprehensif dan *up to date* dengan sasaran meningkatnya pengumpulan, dan pemanfaatan data dalam perencanaan penganggaran responsif gender.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3 berikut ini

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong

	Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan	Perlindungan Anak Kabupaten Bone		
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A

3	<p>Terimplementasi kabupatennya/kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
4	<p>Meningkatnya ketercapaian ketahanan dan kualitas keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedia lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran OPD dan instansi terkait dalam hal upaya peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga
5	<p>Meningkatnya lembaga yang menyediakan layanan bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antar lembaga/instansi terkait dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak
6	<p>Meningkatnya pengumpulan, dan pemanfaatan data dalam perencanaan penganggaran responsif gender.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat sulit mendapatkan data terpilah gender dan anak dari OPD dan instansi terkait. • Belum optimalnya forum data gender dan anak ditingkat kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya SDM pengelola data gender dan anak • Masih rendahnya kesadaran OPD dan instansi/lembaga terkait dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan data gender dan anak

			menyediakan data pilah gender dan anak	
--	--	--	--	--

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tidak berdampak pada perubahan tata ruang wilayah karena kegiatan yang dilaksanakan hanya menambahkan sarana dan prasarana pada tempat yang sudah ada sebelumnya dan tidak merubah tata ruang wilayah.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam hal kajian lingkungan strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun kedepan tidak berimplikasi terhadap lingkungan.

3.4.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas PPPA Kabupaten Bone melalui FGD, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tabel Grouping Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

No	Permasalahan	Hasil Grouping
1.	Kualitas pelayanan informasi publik yang belum memadai	Belum optimalnya dukungan administrasi, sarana prasarana dan kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
2.	Rendahnya Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.	
3.	Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.	
4.	Kurangnya jumlah dan pemahaman SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.	

5.	Rendahnya alokasi anggaran APBD dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah.		
6.	Kurang optimalnya Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun ditandai capaian yang masih rendah.	Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan peningkatan kualitas keluarga	
7.	Kurang optimalnya Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dibandingkan capaian yang masih rendah		
8.	Rendahnya keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.		
9.	Masih tingginya angkatan kerja perempuan yang belum terserap dalam pasar tenaga kerja;		
10	Belum optimalnya pelaksanaan • perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG).		
11	Belum optimalnya pokja PUG dan focal • point yang sudah dibentuk.		
12	Kurangnya Sarana dan Prasarana • kelembagaan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) sesuai standar.		
13	Kurangnya optimalnya sosialisasi dan • penyuluhan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan perlindungan anak sehingga masih Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan & jumlah kasus KDRT.		Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
14	Perempuan banyak menjadi obyek • pornografi menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.		
15	Rendahnya perlindungan terhadap • tenaga kerja & buruh migran perempuan ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.		
16	Belum Optimalnya Peran kelembagaan • perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)		
17	Munculnya berbagai tindak kekerasan • di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, & penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.		

18 •	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur & anak berhadapan dengan hukum (ABH).	Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/ Kota Layak Anak
20 •	Masih tingginya jumlah anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.	
21 •	Masih tingginya jumlah anak yg tdk mengikuti PAUD.	
22 •	Masih ditemukannya beberapa perkawinan pada usia anak.	
23 •	Masih kurangnya fasilitas Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak.	
24 •	Masih kurangnya sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.	
25 •	Rendahnya persentase OPD yang memiliki data pilah gender dan data anak	
26 •	Tidak tersedia sistem informasi gender dan anak secara terencana.	
27 •	Sulitnya memperoleh data pilah gender dan anak dari OPD dan instansi terkait.	

Berdasarkan hasil grouping ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya dukungan administrasi, sarana prasarana dan kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan peningkatan kualitas keluarga.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
4. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
5. Rendahnya ketersediaan data pilah gender dan anak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.
2. Meningkatkan akuntabilitas urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

1. Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah:
 - a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
 - b. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PP-PA Kab. Bone

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,93	92,95	93,25	93,50	94,30	95,01	95,50	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,75	79,01	62,49	65,50	70,01	75,10	75,50	
		Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Tertangani Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Pencapaian Tingkat Kabupaten Layak Anak	Skor	600	600	600	700	700	900	900	
2	Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas urusan DP3A	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelaporan Realisasi Keuangan Urusan Dinas DP3A	Predikat Sakip oleh APIP	Kategori	C (>30-50)	CC (>50-60)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-95)	A (>80-95)	

Tahun 2018 - 2023

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsif gender secara efektif.
2. Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga.
3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak.
4. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak termasuk TPPO.
5. Meningkatkan kualitas lembaga layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.
2. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
3. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.

4. Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga dengan fokus pada penguatan lembaga PUSPAGA.
5. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
6. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
7. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
9. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
10. Penguatan penyediaan dan pemutakhiran data pilah gender dengan fokus pada pengembangan sistem informasi gender dan anak.
11. Peningkatan koordinasi penyediaan dan pemanfaatan data dengan fokus pada penyusunan data gender dan anak.
12. Peningkatan pengelolaan administrasi pelayanan dengan fokus pada penyediaan sarana prasarana, penguatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bone
Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) • Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsif gender secara efektif. 2. Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga. 3. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak. 4. Meningkatkan pemahaman pemerintah aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak termasuk TPPO. 5. Meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak termasuk SDM yang melayani anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG. • Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. • Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan. • Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga dengan fokus pada penguatan lembaga PUSPAGA. • Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan

			<p>korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK).</p>	<p>termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.
				<p>Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak • Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
				<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan penyediaan dan pemutakhiran data pilah gender dengan fokus pada pengembangan sistem informasi gender dan anak. • Peningkatan koordinasi penyediaan dan pemanfaatan

				data dengan fokus pada penyusunan data gender dan anak.
2	Meningkatkan Akuntabilitas urusan DPPPA	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan DPPPA	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelayanan dinas. • Meningkatkan kapasitas SDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan dinas. • Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan. 	Peningkatan pengelolaan administrasi pelayanan dengan fokus pada penyediaan sarana prasarana, penguatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan Kegiatan Dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusutan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semester SKPD
- (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- (4) Administarsi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Penyediaan bahan logistik kantor

- c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konstultasi SKPD
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan dan peralatan dan mesin lainnya
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota
 - b. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi
3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. Program Perlindungan Perempuan

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan KG Dan Hak Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komperhensif Bagi Keluarga Dalam Mewujudkan Kegiatan dan Perlindungan Anak Yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Pengumpulan, Pegelolaan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam
 - a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Kepada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

G. Program Perlindungan Khusus Anak

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan singkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga penyedia layanan anak memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Permendagri 13 Tahun 2018
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab						
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir RENSTRA					
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)		target	Rp (x1000)				
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	1.11.01.15	(1) Program pengarusutamaan gender dan anak pemberdayaan perempuan	Persentase indikator PUG yang terpenuhi pada OPD	%	2,98	2,98	126.000	14,95	145.000	14,95	190.000	57,70	154.000	57,70	154.000	769.000	Bid. Kualitas hidup perempuan					
				Kegiatan:																				
	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	15.01	15.01	Pelebagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Pelebagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah yang dilaksanakan	%	-	-	1	17.000	1	17.000	1	17.000	1	17.000	4	68.000					
					Sub kegiatan																			
					Indeks Pembangunan Gender (IDG)	15.02	15.02	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi perumusan yang dilaksanakan	Dokumen	-	-	1	17.000	1	17.000	1	17.000	1	17.000	4	68.000		
					Rasio KDRT	15.03	15.03	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG yang dilaksanakan	orang	-	100	45.000	-	-	100	45.000	100	45.000	100	45.000	400	180.000	
					Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	15.04	15.04	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.	Jumlah Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan	Laporan	9	5	81.000	5	81.000	5	81.000	5	45.000	24	45.000	44	330.000	
Persentase anak korban kekerasan tertangani sesuai standar	15.05	15.05	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan	Regulasi	-	-	-	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	5	120.000						
				Kegiatan :																				

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan																
				Sub kegiatan :																	
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																
		Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak		(2) Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kelembagaan PUG Aktif Ditingkat Kab, Kec, Desa dan Kelurahan	%	11,55	24,66	509.130	39,77	843.494	57,77	1.001.980	70	1.056.956	80	1.118.314	4.535.424		Bid. Kualitas hidup perempuan	
			2.11.01.16		Persentase Ketersediaan Data Pilah Gender Dan Anak	%	38,46	51,28		58,97		69,23		82,55		89,74				Bid. Data Dan informasi	
				Kegiatan:																	
			16.01	(1) Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Advokasi Dan Fasilitasi PUG	Orang	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.300	30	39.930	120	139.230		
			16.02	(2) Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi, Mekanisme Penanganan, Dan Pencegahan KDRT Secara Terpadu	Orang	30	35	61.118	35	62.118	35	63.118	35	64.118	35	65.118	175	315.590		
			16.03	(3) Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Berperan Dalam Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.	Jumlah Peserta Pelatihan Pemetaan Potensi Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Di Kecamatan Dalam Hal Pengentasan Kemiskinan	Orang	150			150	64.198	150	70.167	150	77.679	150	85.447	600	297.491		

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

			16.04	(4) Pengembangan Materi Dan Pelaksanaan KIE Tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah Media KIE Gender Dan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) Yang Tersedia	buah	-	-	-	15	15.000	15	16.500	15	18.150	15	19.965	60	69.615	
			16.05	(5) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Orang	50	50	36.300	50	39.300	50	43.300	50	36.300	50	48.300	250	167.200	
			16.06	(6) Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak	Jumlah Peserta Pelatihan PPRG Bagi Perencana PD Tkt. Kab, Kec, Desa Dan Kelurahan	orang	-	-	-	50	33.000	50	36.300	50	39.930	50	43.923	100	153.153	
			16.07	(7) Evaluasi Pelaksanaan PUG Dan Perlindungan Anak	Jumlah Hasil Verifikasi Data PUG Dan Perlindungan Anak Tingkat Kab. Dan Kecamatan	Dokumen	1	1	13.608	1	14.968	1	16.468	1	18.112	1	19.923	5	100.047	
			16.08	(8) Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak	Jumlah Peserta Terlatih Pengelola Sistem Informasi Dan Data Analisis Gender Dan Anak	Orang	20	25	32.815	30	36,096	30	39.706	30	43.676	30	48.044	145	200.337	
			16.09	(9) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Aparat Perencana Kecamatan, Desa/ Kelurahan Yang Telah Melaksanakan PUG Yang Aktif	Orang	399	399	89.347	399	98.502	399	98.502	399	98.502	399	98.502	1.995	483.355	
			16.10	(10) Fasilitasi Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan Trafiking	Jumlah Gugus Tugas Penanggulangan Trafiking, Bencana Alam, Konflik Sosial Dan Buruh Migran Yang Terbentuk	Gugus tugas	-	-	-	5	80.000	5	88.000	5	96.800	5	96.800	20	361.600	
			16.11	(11) Pelatihan Untuk Penyebarluasan PUG Dalam Bidang Pembangunan Penyusunan PPRG	Jumlah Aparat Perencana Kabupaten, Kecamatan, Desa Dan Kelurahan Yang Mengikuti Kegiatan TOF PPRG	Orang	50	50	72.141	50	79.355	50	87.290	50	96.020	50	96.020	250	430.826	
			16.12	(12) Penyusunan Dan Evaluasi Standar Operasional Pelayanan SOP	Jumlah SOP Yang Tersusun	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30.000	1	30.000	

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

			16.13	(13) Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Ptppo)	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Yang Dilaksanakan	Orang	80	80	51.565	80	56.721	80	62.393	80	68.633	80	75.496	400	314.800	
			16.14	(14) Peningkatan Kapasitas Peran Dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan Publik	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi, Mekanisme Posisi Perempuan Dibidang Jabatan Publik Di Kec, Desa Dan Kelurahan	Orang	50	50	61.118	50	62.118	50	63.118	50	64.118	50	65.118	250	315.590	
			16.15	(15) Pembinaan, Pengembangan Dan Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi P2TP2A Tkt. Kab, Kec, Desa Dan Kelurahan.	Orang	30	35	61.118	35	62.118	35	63.118	35	64.118	35	65.118	175	315.590	
			16.16	(16) Pencegahan Pidana Perdagangan Anak	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Anak	Orang	-	-	-	-	-	50	75.000	50	82.500	50	90.750	150	248.250	
			16.17	(17) Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	lembaga	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.000	30	39.930	120	138.930	
			16.18	(18) Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Pokja Dan Focal Point PD Dalam Pelembagaan PUG	Orang	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.000	30	39.930	120	138.930	
			16.19	(19) Penguatan Pokja PUG Dan Fokal Point Pengarusutamaan Gender	Jumlah PD Yang Memiliki Fokal Point PUG	Opd				24	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	39	200.000	
			1.11.01.17	(3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	70	100	234.750	100	794.390	100	895.055	100	971.585	100	1.118.131	100	4.013.911	Bid. Perlindungan perempuan dan Anak
				Kegiatan:																
			17.01	(1) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan	Jumlah Regulasi Terkait Kebijakan Perlindungan	Dokumen	-	-	-	1	30.000	-	-	1	30.000	-	-	2	60.000	

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				Perempuan Di Daerah	Perempuan Yang Ditetapkan														
			17.02	(2) Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan Dan Pendampingan Korban KDRT	Jumlah Peserta Yang Mengikuti TOT SDM Pelayanan Dan Pendampingan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak	Orang	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.300	30	39.930	120	139.230
			17.03	(3) Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan	Jumlah SOP Tentang Layanan Penanganan Pengaduan Secara Terpadu Yang Tersusun	SOP	-	-	-	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000	8	120.000
			17.04	(4) Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP) Dan Putus Sekolah	Orang	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.300	30	39.930	120	139.230
			17.05	(5) Sosialisasi Dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah Peserta Advokasi Dan Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	Orang	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.300	30	39.930	120	139.230
			17.06	(6) Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan KDRT	Jumlah Peserta Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelaporan KDRT Korban Kekerasan	Orang	-	-	-	30	30.000	30	33.000	30	36.000	30	39.930	120	139.230
			17.07	(7) Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia Dan Cacat	Jumlah Buku Profil Perlindungan Perempuan Lansia Dan Cacat Yang Tersusun	Buku	-	-	-	-	-	1	30.000	1	33.000	1	36.000	3	99.000
			17.08	(8) Fasilitas Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	Orang	-	-	-	30	65.000	30	65.000	30	65.000	30	65.000	120	260.000
			17.09	(9) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Monev Yang Dilaksanakan	Kali	-	-	-	1	65.000	1	65.000	1	70.000	1	200.000	5	400.000
			17.10	(10) Revitalisasi Panduan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan GSI Di Tingkat Kecamatan, Desa Dan Kelurahan	Orang	-	-	-	30	85.000	30	85.000	30	85.000	30	85.930	120	340.930
			17.11	(11) Penyusunan Profil Statistik Dan Analisis Gender	Jumlah Profil Statistik Dan Analisis Gender Yang Tersusun	Buku	-	2	25.505	2	26.505	2	27.505	2	28.505	2	29.505	10	137.525

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

			17.12	(12) Pengembangan Restorative Justice Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Jumlah Peserta Sosialisasi Yang Mengikuti Pengembangan Restorative Justice Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Orang	-	-	-	-	-	50	65.000	50	65.000	50	65.000	150	195.000		
			17.13	(13) Pembentukan Forum Anak	Jumlah Forum Anak Yang Terbentuk Dan Jumlah Anak Yang Mengikuti Pembentukan Forum Anak Di Kabupaten, Kecamatan Desa Dan Kelurahan	Forum/orang	1	4	151.500	5	166.650	6	183.315	6	201.645	5	221.811	27	924.921		
			17.14	(14) Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Hak-hak dasar Anak	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan kapasitas hak- hak dasar anak di Kabupaten, Kec, Desa dan Kelurahan	Orang	54	54	57.745	54	58.745	54	59.745	54	60.745	54	61.745	270	295.725		
			17.15	(15) Evaluasi Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang layak anak	Lokasi	-	-	-	10	58.745	10	59.745	10	60.745	10	61.745	40	240.980		
			17.16	(16) Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Skor	800	-	-	800	30.000	800	33.000	800	36.300	800	39.930	3.200	465.930		
			17.17	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Orang	-	-	-	54	58.745	54	59.745	54	60.745	54	61.745	216	240.980		
			1.11.01.18	(4) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan	%	44,88	44,88	465.130	53,33	847.160	60	881.314	66,66	918.283	66,66	958.349		4.070.236	Bidang kualitas hidup perempuan	
					Kegiatan:																
				18.01	(1) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Peserta Sosialisasi Pembinaan Organisasi Perempuan Di Kec, Desa Dan Kelurahan	Orang	50	50	151.000	50	152.000	50	153.000	50	154.000	50	155.000	250	765.000	
			18.02	(2) Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	orang	150	-	-	100	196.540	100	216.194	100	237.813	100	261.594	400	912.141		

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

			18.03	(3) Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Penyuluhan Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	orang	-	-	-	54	58.745	54	59.745	54	60.745	54	61.745	216	240.000	
			18.04	(4) Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha Rumah Tangga	Orang	-	-	-	54	58.745	54	59.745	54	60.745	54	61.745	216	240.000	
			18.05	(5) Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan	Jumlah Pameran Hasil Karya Perempuan Di Bidang Pembangunan Yang Di Ikuti	Kegiatan	-	-	-	1	30.000	1	33.000	1	36.300	1	39.930	5	139.230	
			18.06	(6) Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan.	Jumlah Laporan Hasil Monev Di Kec/Desa Dan Kelurahan	Laporan	-	-	-	5	30.000	5	31.000	5	32.000	5	33.000	20	126.000	
			18.07	(7) Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah Kecamatan /Desa Yang Menjadi Lokasi Pembinaan Peningkatan Peranan Keluarga Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera	Kec/Desa	10	10	132.065	10	133.065	10	134.065	10	135.065	10	136.065	50	670.325	
			18.08	(8) Pembentukan Operasionalisasi Dan Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Yang Terbentuk	Puspaga	-	1	50.000	7	55.000	7	60.500	7	66.550	6	73.205	38	305.255	
			18.09	(9) Peningkatan Peranan Keluarga Menuju Ketahanan Dan Kesejahteraan (P2K3)	Terselenggaranya Pembinaan Kec/ Desa Pada Lokasi P2K3	Kec/Desa	1	1	132.065	1	133.065	1	134.065	1	135.065	1	136.065	5	670.325	
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan DPPP.	Predikat Sakip Oleh APIP	1.11.01.01	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	409.966	100	424.212	100	439.133	100	454.707	100	464.776		2.192.794	Sekretariat
				Kegiatan:																
			01.02	(1) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah koneksi internet (wifi) yang terbayar	Rek	-	12	60.000	12	65.000	12	70.000	12	75.000	12	76.000	60	270.000	

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

			01.07	(2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Keuangan selama setahun	Kali	-	84	22.500	84	25.000	84	27.500	84	30.000	84	30.000	420	135.000	
			01.15	(3) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah pembayaran Media yang Menyediakan bahan bacaan	Kali	144	144	10.000	144	10.000	144	10.000	144	10.000	144	10.000	720	50.000	
			01.23	(4) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	Jumlah rakor dan konsultasi yang diikuti	Kali	50	50	250.000	50	250.000	50	250.000	50	250.000	50	250.000	250	1.250.000	
			01.24	(5) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran	Paket	7	7	67.466	7	74.212	12	81.633	12	89.707	12	98.776	50	411.794	
			1.11.02	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	%	100	100	223.700	100	363.700	100	1.023.700	100	1.023.700	100	963.700		2.514.753	Sekretariat
				Kegiatan:																
			02.03	(1) Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terbangun	Unit	-	-	-	-	-	1	700.000	1	700.000	1	700.000	3	700.000	
			02.05	(2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Unit	-	1	20.000	6	120.000	4	80.000	4	80.000	1	20.000	16	320.000	
			02.07	(3) Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	10	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	25	250.000	
			02.09	(4) Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis	5	4	60.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	24	260.000	
			02.10	(5) Pengadaan mebeliur	Jumlah pengadaan Mebeliur Kantor	Jenis	-	-	-	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	20	200.000	
			02.22	(6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan gedung kantor (Kegiatan)	Kegiatan	1	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	5	150.000	
			02.24	(7) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (Paket)	Paket	3	4	40.000	10	40.000	14	40.000	18	40.000	19	40.000	55	200.000	

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

			02.26	(8) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	3	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000	5	15.000	25	75.000	
			02.28	(9) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	5	5	7.200	5	7.200	5	7.200	5	7.200	5	7.200	25	36.000	
			02.29	(10) Pemeliharaan rutin berkala meubeleur	Jumlah jenis meubeleur gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Jenis	-	3	1.500	3	1.500	3	1.500	3	1.500	3	1.500	14	7.500	
			1.11.01.03	3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur setiap tahun anggaran	%	80	85	-	90	-	90	5.400	95	5.400	95	5.400		16.200	Sekretariat
				Kegiatan:																
			03.02	(1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Bagi ASN	Pasang	-	-	-	-	-	18	5.400	18	5.400	18	5.400	54	16.200	
			1.11.01.05	4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	-	-	-	-	85	200.000	90	200.000	90	200.000		600.000	Sekretariat
				Kegiatan:																
			05.01	(1) Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Formal	Orang	-	-	-	-	-	3	100.000	3	100.000	3	100.000	9	300.000	
			05..	(2) Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Tugas Dan Fungsi ASN	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis	Orang	-	-	-	-	-	5	100.000	5	100.000	5	100.000	15	300.000	
			1.11.01.06	5. Program Peningkatan Sistim Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	%	90	90	6.000	90	6.000	90	6.000	90	6.000	90	6.000		30.000	Sekretariat
				Kegiatan:																
			06.01	(1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan	Jumlah Jenis Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang Tersusun	Dokumen.	4	4	3.000	4	3.000	4	3.000	4	3.000	4	3.000	20	15.000	Sekretariat

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				Ikhtisar Realisasi Kinerja PD																		
			06.02	(2) Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Triwulan Dan Semesteran	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan Dan Semesteran Yang Tersusun	Laporan	18	18	3.000	18	3.000	18	3.000	18	3.000	18	3.000	90	15.000			
			1.11.01.08	6. Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umumsetiap tahun anggaran	%	100	100	39.000	100	39.000	100	39.000	100	39.000	100	39.000		195.000	Sekretariat		
				Kegiatan:																		
			08.01	(1) Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan kinerja dan Anggaran Yang Tersusun selama satu tahun anggaran	dokumen	5	6	4.000	6	4.000	5	4.000	5	4.000	5	4.000	27	20.000			
			08.02	(2) Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Pemeliharaan Website PD Yang Dikelola Dalam Satu Tahun Anggaran	Website	1	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	5	25.000			
			08.03	(3) Promosi Dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Dan Promosi Pembangunan Yang Diikuti	kegiatan	1	1	30.000	1	30.000	-	30.000	1	30.000	1	30.000	4	150.000			
JUMLAH											2.013.676		3.462.956		4.681.582		4.829.631		5.027.670		18.941.318	

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Permendagri 90 Tahun 2019
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Akhir RENSTRA	
								Target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)	target	Rp (x1000)		target	Rp (x1000)
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).	2.8.02	(1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Anak Pemberdayaan Perempuan	Persentase Indikator (PUG) Peningkatan Strategi Pembangunan Untuk Mencapai suatu keadilan dan Kesetaraan Gender Kabupaten Kota (%)	%	75 %	75 %	135.000.000	79 %	137.460.000	85 %	150.000.000	89 %	150.000.000	92,07 %	150.000.000	95,50 %	1.602.715.000	Bid. Kualitas hidup perempuan
				Kegiatan:																
			2.8.02.02.01	Pelebagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Pelebagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah yang dilaksanakan	%	75 %	75 %	43.550.000	79 %	44.960.000	85 %	46.110.000	89 %	48.415.500	92,07 %	50.836.000	95,50 %	226.540.000	Seksi Pengarusutamaan Gender
			2.8.2.2.01.1	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi perumusan yang dilaksanakan	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

			2.8.2.2.01.2	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG yang dilaksanakan	Orang	15	15	15.500.000	20	16.910.000	20	16.910.000	20	16.910.000	20	16.910.000	95	82.840.000	Sub KegPengarusutamaan Gender
			2.8.2.2.01.3	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG.	Jumlah Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan	Jml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub KegPengarusutamaan Gender
			2.8.2.2.01.4	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan	Orang	75	75	28.050.000	75	28.500.000	80	29.200.000	80	29.200.000	80	29.200.000	390	143.700.000	Sub KegPengarusutamaan Gender
				Kegiatan :																
			2.8.2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan	%	75 %	75 %	26.000.000	79 %	26.500.000	85 %	27.000.000	89 %	27.000.000	92,07 %	27.000.000	95,50 %	1.376.175.000	Sub KegPengarusutamaan Gender
				Sub kegiatan :																
			2.8.2.2.02.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Orang	75	75	26.000.000	75	26.500.000	80	27.000.000	80	27.000.000	80	27.000.000	390	1.376.175.000	Sub KegPengarusutamaan Gender
			2.8.2.2.02.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan	Jml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub KegPengarusutamaan Gender

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

Kegiatan :																				
			2.8.2.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan	%	75 %	75 %	66.000.000	79 %	66.000.000	85 %	77.301.000	89 %	77.301.000	92,07 %	77.301.000	95,50 %	346.303.000	Seksi Pemberdayaan Perempuan
Sub Kegiatan :																				
			2.8.2.203.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang dilaksanakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub KegPemberdayaan Perempuan
			2.8.2.203.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	110	110	55.000.000	115	55.000.000	122	63.780.000	122	63.780.000	122	63.780.000	591	301.340.000	Sub KegPemberdayaan Perempuan
			2.8.2.203.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan yang dikembangkan	Jml.	1	1	11.200.000	1	11.200.000	1	13.521.000	1	13.521.000	1	13.521.000	5	62.963.000	Sub KegPemberdayaan Perempuan
	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani	2.8.03	(2) Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh	%	75 %	75 %	325.000.000	79 %	332.000.000	85 %	340.210.000	89 %	342.837.000.	95,50	345.684.825	97,50	1.419.311.500	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

an dan anak	sesuai standar			petugas terlatih didalam pelayanan unit terpadu (%)																	
				Kegiatan:																	
		2.8.3.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan yang dapat dicegah	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Hak Perlindungan Perempuan
			Sub Kegiatan :																		
		2.8.3.201.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap yang dilaksanakan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Hak Perlindungan Perempuan
		2.8.3.201.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Hak Perlindungan Perempuan
			Kegiatan :																		
		2.8.3.202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi yang disediakan	%	75 %	75 %	235.000.000	79 %	240.000.000	85 %	244.987.000	89 %	244.987.000	95,50	244.987.000	97,50	1.209.961.000			Seksi Hak Perlindungan Perempuan
			Sub Kegiatan																		
		2.8.3.202.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Hak Perlindungan Perempuan

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Korban Kekerasan yang disediakan															
			2.8.3.202.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dilaksanakan	Paket	1	1	235.000.000	1	240.000.000	1	244.987.000	1	244.987.000	1	244.987.000	5	1.209.961.000	Sub Hak Perlindungan Perempuan
				Kegiatan :																
			2.8.3.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapat penguatan dan pengembangan	%	75 %	75 %	40.000.000	79 %	41.000.000	85 %	42.783.500	89 %	42.783.500	95,50	42.783.500	97,50	209.350.500	Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
				Sub Kegiatan :																
			2.8.3.203.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang dilaksanakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
			2.8.3.203.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	25	25	40.000.000	25	41.000.000	30	42.783.500	30	42.783.500	30	42.783.500	140	209.350.500	Sub Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

			2.8.3.203.3	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus yang disediakan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
			2.8.3.203.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapat penguatan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
			2.8.4	(3) Program Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	Persentase Keluarga Yang Mendapatkan Pemberdayaan (%)	%	75 %	80 %	128.210.000	81,40 %	129.710.000	82,30	131.779.518	83,30	131.779.518	84,30	131.779.518	85,50	635.827.374	Bid. Perlindungan perempuan dan Anak
				Kegiatan:																
			2.8.4.201	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang mendapat peningkatan kualitas	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga
				Sub Kegiatan :																
			2.8.4.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Ketahanan dan Kualitas Keluarga
			2.8.4.201.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Kualitas Keluarga yang mendapat penguatan/pembi naan															Perempuan dan Anak
				Kegiatan :																
			2.8.4.203	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dilaksanakan	%	75%	80 %	19.710.000	81,40	19.710.000	82,30	19.720.000	83,30	19.720.000	84,30	19.720.000	85,50	98.580.000	Seksi Pemenuhan Hak Khusus Anak
				Sub Kegiatan :																
			2.8.4.203.1	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan yang dilaksanakan	Orang	30	30	19.710.000	30	19.710.000	35	19.720.000	35	19.720.000	35	19.720.000	165	98.580.000	Sub. Kegiatan Pemenuhan Hak Khusus
	Meningkatnya indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2.8.5	(4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data Indikator Pengarustamaan Gender Tersedia (%)	%	80 %	80 %	35.900.800	85 %	36.200.000	87 %	36.788.200	87 %	38.627.610	87 %	40.558.990	87 %	115.974.800	Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
				Kegiatan:																
			2.8.5.201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis dan disajikan	%	80 %	80 %	35.900.800	85 %	36.200.000	87 %	36.788.200	87 %	38.627.610	87 %	40.558.990	87 %	115.974.800	Seksi Pengolahan Dta dan Innformasi
				Sub Kegiatan :																

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

			2.8.5.201.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang disediakan	Buku	50	50	16.000.000	50	16.500.000	50	16.887.400	55	17.731.770	60	18.618.358	315	53.237.528	Sub. Kegiatan Pengolahan data dan Informasi
			2.8.5.201.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data yang disajikan dan dimanfaatkan	Orang	40	40	19.900.800	40	19.700.000	40	19.900.800	40	20.895.840	40	21.940.632	200	62.737.272	Sub Kegiatan Analisis Data dan Penyajian
	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Tingkat capaian kabupaten layak anak	2.8.6	(5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1. Persentase Kecamatan, Desa dan Kelurahan Layak Anak (%) 2. Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	%	85	85	164.000.000	88.00 %	164.630.000	89.10	165.971.200	89.10	165.971.200	89.10%	165.971.200	90,02 %	829.207.978	Bidang Perlindungan dan Anak
				Kegiatan :																
			2.8.6.201	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha yang dilaksanakan	%	85	85	114.000.000	88.00 %	114.500.000	88.00 %	115.841.200	88.00	115.841.200	88.00	115.841.200	90,02 %	578.557.978	Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
				Sub Kegiatan :																
			2.8.6.201.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak kepada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	Orang	200	200	40.000.00	200	40.000.000	200	40.437.500	200	40.437.500	200	40.437.500	1000	203.845.378	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				Daerah Kabupaten/Kota	Anak yang dikembangkan																				
			2.8.6.2.02.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapat penguatan jejaring	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Kegiatan Pemenuhan Khusus Anak				
Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	2.8.7		(6) Program Perlindungan Khusus Anak	1. Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu) 2. Cakupan layanan pemulangan bagi anak korban kekerasan	%	%	100	42.000.500	100	42.816.500	100	42.816.500	100	42.816.500	100	42.816.500	100	210.002.500	UPTD DPP-PA					
						Kegiatan:																			
						2.8.7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak yang dapat dicegah	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD DPP-PA
						Sub Kegiatan :																			
		2.8.7.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang dilaksanakan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD DPP-PA					

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan															
			2.8.7.203.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang dilaksanakan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Pemenuhan Hak Khusus Anak
Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas urusan DP3A	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelaporan Realisasi Keuangan Urusan Dinas DP3A	Predikat Sakip Oleh APIP	2.8.01	(7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan realiasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	%	100	100	2.335.807.009	100	2.335.807.009	100	2.335.807.009	100	2.445.240.949	100	2.550.445.415	100	9.667.300.382	Sekretariat
				Kegiatan:																
		Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Dokumen Kinerja Perencanaan SKPD	2.8.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja yang tersusun	%	100	100	19.872.200	100	19.872.200	100	19.872.200	100	20.865.810	100	21.909.100	100	102.917.242	Sub. Program dan Keuangan
				Sub Kegiatan :																
			2.8.1.201.01	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas	Dok	5	5	14.757.000	5	14.757.000	5	14.757.000	5	15.494.850	5	16.269.592	25	76.062.442	Sub. Program dan Keuangan

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				Perencanaan Perangkat Daerah	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tersusun															
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Program dan Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Program dan Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Program dan Keuangan
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja yang tersusun	Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub Evaluasi dan Pelaporan
			2.8.1.201.05	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	Dok	3	3	5.115.200	3	5.115.200	3	5.115.200	3	5.370.960	3	5.639.508	9	26.854.800	Sub Evaluasi dan Pelaporan
				Kegiatan :																
		Peningkatan Administrasi Kinerja Pelaporan Keuangan DP3A	2.8.1.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	1.692.869.809	100	1.692.869.809	100	1.692.869.809	100	1.776.706.889	100	1.866.388.963	100	8.722.511.289	Sub. Bagian Program dan Keuangan
				Sub Kegiatan																
			2.8.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	Bulan	12	12	1.676.741.809	12	1.676.741.809	12	1.676.741.809	12	1.760.578.899	12	1.848.607.843	60	8.639.412.169	Sub. Bagian Program dan Keuangan
				Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Bagian Program dan Keuangan

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yg dilaksanakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Bagian Program dan Keuangan	
				Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang dilaksanakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Bagian Program dan Keuangan	
				Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Bagian Program dan Keuangan	
				Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan yang disusun	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Bagian Program dan Keuangan	
			2.8.01.202.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulanan /semesteran SKPD yang disusun	Kali	4	4	16.128.000	4	16.128.000	4	16.128.000	4	16.934.400	4	17.781.120	20	83.099.120	Sub. Bagian Program dan Keuangan
				Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Yang tersusun	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Bagian Program dan Keuangan
				Kegiatan:																
		Peningkatan Kualitas Kinerja Pegawai DP3A	2.8.01.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi	%	100	100	117.443.000	100	117.443.000	100	117.443.000	100	118.015.150	100	107.261.597	100	577.605.747	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

Umum Perangkat Daerah																				
Sub Kegiatan :																				
				Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai yang diadakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
				Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Paket														Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
				Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang disusun	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
				Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang diadakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
				Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
				Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah Pemulangan pegawai yang pensiun yang diadakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
				Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas	Jumlah Pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas yang diadakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				Pemindahan tugas ASN	Jumlah Pemindahan tugas ASN yang diadakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
			2.8.01.205.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang diadakan	Orang	7	7	106.000.000	7	106.000.000	7	106.000.000	7	106.000.000	35	106.000.000	530.000.000		DPP-PA
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang diadakan	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPP-PA
			2.8.01.205.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	30	30	11.443.000	30	11.443.000	30	11.443.000	30	12.015.150	30	12.615.907	150	58.959.300	DPP-PA
				Kegiatan:																
		Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	2.8.01.206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	342.380.000	100	342.380.000	100	342.380.000	100	359.499.000	100	377.473.950	100	1.764.113.950	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
				Sub Kegiatan :	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat Teknis															
				Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
			2.8.01.206.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) penunjang	Unit	4	4	25.860.000	4	25.860.000	4	25.860.000	4	27.153.000	4	28.510.650	12	133.243.650	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

					administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan																
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
			2.8.01.206.03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	Paket	4	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.000.000	4	14.7000.00	4	15.435.000	12	72.135.000	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
			2.8.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan penunjang administrasi perkantoran sesuai rencana kebutuhan	Paket	2	6	13.600.000	6	13.600.000	6	13.600.000	6	14.280.000	6	14.994.000	30	70.074.000	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
			2.8.01.206.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan	Bulan	12	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.560.000	12	7.938.000	36	37.096.000	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
				Penyediaan bahan/material	Jumlah Penyediaan bahan/material yang disediakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
		Peningkatan Kualitas Kinerja SDM Dinas DP3A	2.8.01.206.04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan Aparat dalam kegiatan rutin pelaksanaan	Paket	1	1	281.720.000	1	281.720.000	1	281.720.000	1	295.806.000	1	310.596.300	240	1.451.565.300	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat yang disediakan	Jml.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
			2.8.01.208.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Paket Pembayaran Jasa Komunikasi Bulanan (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan	Bulan	12	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.300.000	12	6.615.000	36	30.915.000	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
			2.8.01.208.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum yang dibayarkan perbulan untuk pelaksanaan administrasi perkantoran	Orang	11	11	58.782.000	11	58.782.000	11	58.782.000	11	61.721.100	11	64.807.155	55	302.874.255	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
				Kegiatan :																	
		Jumlah Pemeliharaan Asset Milik Daerah yang terpeliharaan	2.8.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai Rencana Kebutuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	100	73.460.000	100	73.460.000		100	73.460.000	100	77.133.000	100	80.989.650	100	378.502.650	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian
				Sub Kegiatan :																	
			2.8.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas secara rutin/berkala	Jml.	36	36	54.000.000	36	54.000.000	36	54.000.000	36	56.700.000	36	59.535.000	180	278.235.000	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	

Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

				atau Kendaraan Dinas Jabatan	sesuai rencana kebutuhan																
			2.8.01.209.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Unit	20	20	13.760.000	20	13.760.000	20	13.760.000	20	14.448.000	20	15.170.400.	100	70.898.400	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
				Pemeliharaan aset tetap lainnya	Jumlah Pemeliharaan aset tetap lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
				Pemeliharaan aset tak berwujud	jumlah Pemeliharaan aset tak berwujud	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPP-PA	
			2.8.01.209.09	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah Paket Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sesuai rencana kebutuhan.	Unit	1	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.700.000	1	5.985.000	1	6.284.250	5	29.369.250.	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
				Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.	Jumlah Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sub. Keg. Umumdan Kepegawaian	
Program Pendukung kesekretariatan DP3A									100	2.335.807.009	100	2.335.807.009	100	2.335.807.009	100	2.445.240.949	100	2.550.445.415	100	9.667.300.382	
Program Utama Urusan DP3A									85 %	830.111.300	87%	842.816.500	89%	867.565.418	90 %	872.031.828	90,01%	876.811.003	90,50%	4.289.336.079	
JUMLAH									100%	3.165.918.309	100 %	3.178.623.509	100 %	3.203.372.427	100 %	3.317.272.777	100 %	3.427.256.448	100 %	14.480.339.534	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bone yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91,95	91,96	91,98	92,01	92,04	92,07	92,07
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,49	62,53	62,53	70,01	70,20	70,50	80,00
3	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Pencapaian Tingkat capaian kabupaten layak anak	Skor	600	600	700	700	900	900	900

Tabel 7.2
Indikator Program
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	-	-	46,32	47,50	48,23	49,01	49,01
2	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	-	-	9,87	8,85	7,87	6,70	6,70
3	Persentase perempuan kepala rumah tangga miskin yang mendapat pemberdayaan	%	-	-	10	10	20	40	40
4	Persentase data Indikator Pengarusutamaan Gender Yang Tersedia	%	-	-	15	15	20	50	50
5	Persentase Kecamatan, Desa dan Kelurahan Layak Anak	%	-	-	55	65	70	75	75
6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	-	-	0,33	0,31	0,29	0,27	0,27

		instansi terkait kabupaten							
7	Predikat SAKIP oleh APIP	Kategori	C (>30-50)	CC (>50-60)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	A (>80-90)	A (>80-90)

BAB VIII **P E N U T U P**

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018–2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021–2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2019, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bone wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.